



## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH

PUJI RAHAYU<sup>1</sup>, SITI ALFIAH<sup>2</sup>, NURUL HIDAYATI MURTAFAH<sup>3</sup>

<sup>1</sup>. Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, IAI An Nur Lampung

<sup>2</sup>. Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, IAI An Nur Lampung

<sup>3</sup>. IAI An Nur Lampung

Email: [pujirahayu290785@gmail.com](mailto:pujirahayu290785@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitialfiah586@gmail.com](mailto:sitialfiah586@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *This research is motivated by the disparity in financing between schools in villages and in cities. On the other hand, schools in villages are required to be able to provide quality education at an affordable cost. Therefore, it is necessary to manage education financing effectively and efficiently. This study uses a qualitative descriptive analysis method which aims to find out how the educational financing management process at MA Hasanudin is. Funding management at MA Hasanudin starts from planning, recording, monitoring and financial accountability. The financial planning process at MA Hasanudin begins with holding a plenary meeting, identifying receipts and expenditures, compiling, proposing, revising, and ratifying the RAPBM. Documents in the financial records at MA Hasanudin such as cashbooks, invoices, cash ledgers, payroll receipts, bank ledgers, financial reports, and savings books have been able to explain the financial conditions that exist in MA Hasanudin. The monitoring process at MA Hasanudin begins with setting standards, comparing implementation with standards, identifying deviations, and finding solutions to deviations. The process of financial accountability at MA Hasanudin begins with the preparation of a financial accountability report up to the ratification of the financial statements. With regard to education financing management, it is hoped that madrasahs will be able to maintain and carry out financial management effectively, efficiently and transparently so that what has been planned in accordance with the objectives of the madrasa can be achieved.*

**Keywords:** *Management, Education Financing*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan pembiayaan antara sekolah di desa dan di kota. Di sisi lain sekolah di desa dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan bermutu dengan biaya yang terjangkau. Maka dari itu diperlukan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien. studi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen pembiayaan pendidikan di MA Hasanudin. Manajemen pembiayaan di MA Hasanudin dimulai dari perencanaan, pencatatan, pengawasan serta pertanggung jawaban keuangan. Proses perencanaan keuangan di MA Hasanudin dimulai dengan mengadakan rapat pleno, mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran, menyusun, mengusulkan, revisi, hingga pengesahan RAPBM. Dokumen dalam pencatatan keuangan di MA Hasanudin seperti buku kas, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank, laporan keuangan, dan buku tabungan telah mampu menjelaskan kondisi keuangan yang ada di MA Hasanudin. Proses mengawasi di MA Hasanudin dimulai dengan menentukan standar, membandingkan pelaksanaan dengan standar, mengidentifikasi penyimpangan, hingga penemuan solusi atas penyimpangan. Dalam proses pertanggung jawaban keuangan di MA Hasanudin dimulai dengan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan hingga pengesahan laporan keuangan. Sehubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, diharapkan madrasah mampu mempertahankan dan melaksanakan manajemen pembiayaan secara efektif, efisien, serta transparan sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan madrasah dapat dicapai.

**Kata kunci:** *Manajemen, Pembiayaan Pendidikan*



## PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam mutu pendidikan adalah pembiayaan. Pembiayaan kadang juga merupakan inti dari setiap permasalahan pendidikan, apalagi jika dihubungkan dengan Pembiayaan pendidikan pada swasta yang seluruhnya bersumber dari dana masyarakat walaupun sebenarnya ada bantuan dari pemerintah tetapi tidak terlalu signifikan untuk dibuat acuan dalam penentuan kebijakan maka kualitas pendidikan tinggi swasta tentu sangat bergantung pada bagaimana manajemen pembiayaannya. Manajemen Pembiayaan yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah lembaga pendidikan untuk memajukan atau meningkatkan kualitasnya (Mesiono et al. 2021). Pendidikan dikatakan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memberi bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar dapat berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon tenaga kerja. Pendidikan dipandang sebagai sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa dan membentuk karakter bangsa (Yasin and Novianti 2021).

Tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (Rustiawan 2015). Pendidikan nasional memiliki visi “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayakan semua warga negara berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang berubah”. Berdasarkan hasil pengendalian mutu pendidikan, menyebutkan bahwa pendidikan memegang peranan kunci, dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas (Rahmadoni 2018). Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemakan pesan-pesan konstitusi serta dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian (Sonedi, Jamalie, and Majeri 2017).

Investasi dalam bidang pendidikan tentu saja akan memberikan dampak yang lebih besar dari pada investasi dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu para orang tua berupaya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu. Danim menyebutkan bahwa pengertian mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita (Abidin 2017). Menurut Supriyadi biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam



penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Pembiayaan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu- satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang berkualitas hanya dalam angan-angan (Fattah 2009).

Penyelenggaraan pendidikan keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Keuangan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lain (Sudarmono, Hasibuan, and Us 2021). Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik- baiknya. Agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sehingga dalam hal pengelolaan perlu dilakukan manajemen keuangan yang baik (Waliyah, Dini, and Syarif 2021). Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Murtafiah 2022). Manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/ diusahakan secara sengaja dan sungguh- sungguh, serta pembinaan secara continue terhadap biaya pendidikan operasional sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu tujuan pendidikan.

Analisis efektifitas biaya yang digunakan harus memperhatikan karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan. Perbedaan karakteristik situasi dan input mempunyai implikasi pada biaya pendidikan yang diperlukan. Karena itu keputusan tentang efisiensi haruslah kontekstual dan proporsional (Arifudin et al. 2021). Keputusan kontekstual dan proporsional ini sangat membutuhkan ketersediaan informasi tentang karakteristik situasi dan input yang terlibat dalam proses pendidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai. Sedangkan Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil (Mesiono et al. 2021). Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. (a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. (b) Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya (Efrina and Warisno 2021).

Masyarakat desa yang umumnya berada pada kondisi masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah berharap agar penyelenggaraan pendidikan di daerahnya



diselenggarakan dengan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah dalam hal ini tentu saja ikut serta membantu terselenggaranya pendidikan di daerah pedesaan. Masalah yang dihadapi setelah terselenggaranya pendidikan untuk masyarakat desa tidak sampai disitu saja. Peningkatan mutu kualitas pendidikan juga harus senantiasa diperhatikan setiap tahunnya. Mutu pendidikan juga penting untuk diperhatikan supaya kesenjangan mutu antara pendidikan di kota dan di desa tidak begitu mencolok. Di sinilah peran penting sebuah lembaga pendidikan untuk bisa mengelola pembiayaannya dengan baik agar dana yang ada dapat dimaksimalkan untuk peningkatan mutu pendidikan. MA Hasanudin sebagai sekolah swasta yang berdiri di daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah mampu menyelenggarakan pendidikan dengan biaya yang terjangkau dengan membebaskan peserta didik dari biaya uang gedung, biaya SPP (Sumbangan Pembinaan pendidikan), biaya ujian tengah semester, serta biaya ujian semester. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang murah ternyata MA Hasanudin Bandar Lampung mampu meluluskan seluruh peserta didik dalam penyelenggaraan UN yang diselenggarakan oleh pemerintah, dengan hasil rata-rata UN di MA Hasanudin lebih tinggi dari nilai rata-rata UN pada tingkat kabupaten dan provinsi. Penyelenggaraan pendidikan yang murah dan mampu meluluskan peserta didik dalam penyelenggaraan UN tentu mengharuskan manajemen sekolah mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien sehingga sekolah tetap mampu meningkatkan mutu pendidikan setiap tahunnya. Menurut Luneto manajemen pembiayaan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah (Sudarmono et al. 2021).

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah dana yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan (Handoko 2022). Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas mutlak



diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajer hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknik yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional (Hasan et al. 2022). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran keuangan di MA Hasanudin. (2) Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan keuangan di MA Hasanudin. (3) Untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan keuangan di MA Hasanudin. (4) Untuk mengetahui bagaimana proses pertanggung jawaban keuangan di MA Hasanudin.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi. Semua data dan informasi baik berupa data primer maupun data sekunder diwujudkan dalam bentuk deskriptif (Gunawan 2022). Metode kualitatif deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan proses manajemen pembiayaan pendidikan di MA Hasanudin yang terdiri atas proses penganggaran, proses pencatatan keuangan, proses pengawasan keuangan, dan proses pertanggung jawaban keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang bersumber dari kepala MA Hasanudin, Bendahara MA Hasanudin, dan Ketua Yayasan. Observasi terkait dengan manajemen pembiayaan, dan dokumentasi terkait dengan pencatatan keuangan di MA Hasanudin. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi, uji dependabilitas data, uji transferabilitas, dan juga uji konfirmasi (Nugrahani and Hum 2014). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, hingga pada tahap penarikan kesimpulan (Burhan, Afifah, and Sari 2022).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setiap kegiatan manajemen selalu dimulai dengan proses perencanaan, begitu juga kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan di MA Hasanudin yang dimulai dengan kegiatan perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan harus dilaksanakan secara sistematis. Dalam proses penganggaran di MA Hasanudin dimulai dengan mengadakan (1) rapat pleno madrasah, (2) mengidentifikasi rencana penerimaan madrasah, (3) mengidentifikasi rencana pengeluaran madrasah, (4) menyusun RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Madrasah), (5) melakukan revisi RAPBM, (6) hingga pada tahap pengesahan RAPBM. Sebelum tahun ajaran baru dimulai MA Hasanudin mengadakan rapat pleno madrasah terkait dengan pembahasan RAPBM pada tahun ajaran 2022/2023 rapat pleno diselenggarakan pada tanggal 20 juni 2022 rapat ini dihadiri oleh kepala madrasah, 10 dewan guru, bendahara madrasah, ketua yayasan, 2 perwakilan pengurus Yayasan dan 58 orang tua siswa MA Hasanudin. Rapat Pleno yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali ini membahas pembiayaan madrasah diantaranya pembahasan terkait apa saja biaya yang akan dibebankan kepada wali murid sekaligus menentukan berapa besaran nominalnya, serta pembahasan terkait dengan penyusunan RAPBM. Dalam rapat pleno ini juga dibahas tentang rencana



pengembangan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan selama satu tahun ke depan. Sebelum menyusun RAPBM, pihak sekolah harus mengidentifikasi apa saja yang menjadi sumber penerimaan sekolah. Proses ini menjadi penting untuk mengetahui apakah penerimaan tersebut sudah bisa mencukupi pembiayaan pendidikan atau sekolah perlu mencari sumber penerimaan lainnya. Sumber- sumber pendapatan yang telah diidentifikasi kemudian dihitung dan diperkirakan besarnya. Sumber penerimaan yang diperoleh MA Hasanudin berasal dari dana BOS.

Dalam menentukan rencana pengeluaran MA Hasanudin mengacu pada visi, misi madrasah. Dengan mengacu visi, misi madrasah akan membuat pengeluaran madrasah menjadi efektif karena sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Madrasah. Pengeluaran madrasah terdiri dari pengeluaran program sekolah, pengeluaran non program sekolah serta belanja lain-lain. Setelah melakukan identifikasi terhadap penerimaan dan pengeluaran madrasah selanjutnya kepala madrasah dan bendahara madrasah memformulasikan berapa besar nominal untuk setiap pos pengeluaran ke dalam RAPBM yang disusun sesuai dengan bentuk draf yang telah disepakati. Draft RAPBM yang telah disusun tersebut nantinya akan diusulkan kepada pihak yayasan untuk disetujui. Setelah draft RAPBM diusulkan kepada pihak yayasan langkah selanjutnya yaitu pembahasan RAPBM antara kepala madrasah dan ketua Yayasan, jika dalam rapat tersebut dikehendaki adanya perubahan atau revisi maka kepala madrasah dan bendahara madrasah harus melakukan revisi atau perbaikan RAPBM terlebih dahulu.

RAPBM yang telah diperbaiki nantinya akan disahkan atau disetujui untuk dilaksanakan. Pengesahan RAPBM dilakukan oleh kepala sekolah dan ketua yayasan, yaitu dengan ditanda tangannya RAPBM tersebut, sehingga RAPBM dapat segera dilaksanakan oleh madrasah. Penyusunan RAPBM (Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Madrasah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan dalam hal ini madrasah, maka dari itu RAPBM perlu direncanakan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Fattah terdapat beberapa perbedaan antara pendapat Fattah dengan implementasi penganggaran atau penyusunan anggaran di MA Hasanudin. Dalam pendapat Fattah tahapan pertama dalam penganggaran adalah melakukan identifikasi kegiatan selama satu tahun anggaran, sedangkan pelaksanaan di MA Hasanudin tahapan pertama yaitu mengadakan rapat pleno madrasah, dalam rapat plenoinip peserta rapat melakukan pembahasan terkait dengan pembiayaan pendidikan dan juga rencana kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh MA Hasanudin selama satu tahun anggaran, artinya MA Hasanudin juga melakukan identifikasi kegiatan selama satu tahun anggaran di dalam rapat pleno. Perbedaan lain antara pendapat Fattah dan juga pelaksanaan perencanaan keuangan di MA Hasanudin adalah identifikasi terhadap pengeluaran- pengeluaran selama satu tahun anggaran. Selain melakukan identifikasi terhadap penerimaan madrasah, MA Hasanudin juga melakukan identifikasi terhadap pengeluaran madrasah sehingga madrasah dapat mendahulukan pengeluaran-pengeluaran yang menjadi prioritas madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan (Warisno and Hidayah 2021).

Identifikasi terhadap pengeluaran juga diperlukan untuk memudahkan madrasah atau sekolah melaksanakan penganggaran keuangan secara efektif dan efisien. Selain itu



identifikasi pengeluaran dapat memudahkan madrasah dalam penyusunan anggaran, karena madrasah telah mengetahui pengeluaran- pengeluaran yang harus diprioritaskan dalam peningkatan mutu madrasah. Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan keuangan sekolah baik itu transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran selalu dilakukan pembukuan untuk menghindari terjadinya salah tulis, atau salah paham di kemudian hari karena bendahara lupa mencatat transaksi yang telah terjadi. Bentuk-bentuk pembukuan atau pencatatan keuangan yang digunakan di MA Hasanudin meliputi buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku penerimaan gaji, laporan keuangan, faktur, dan juga buku tabungan. Format buku kas umum yang digunakan oleh MA Hasanudin memuat tanggal, no. kode, no. bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Fungsi buku kas umum adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap hari, selain itu juga memuat saldo setiap akhir bulannya. Buku kas umum ini dicatat dan dilaporkan setiap bulannya kepada kepala madrasah. Melalui buku kas umum ini kepala madrasah dapat mengetahui berapa penerimaan dan pengeluaran madrasah. Buku pembantu kas di MA Hasanudin ini dimaksudkan untuk membantu pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Sama halnya dengan buku kas umum tapi dalam buku pembantu kas ini lebih berfungsi untuk membantu pencatatan sebelum dipindahkan ke buku kas umum. Dalam buku pembantu kas terdapat kolom debit untuk saldo penerimaan dan kolom kredit untuk pengeluaran. Buku pembantu kas ini biasanya digunakan pada saat dana BOS belum diterima oleh madrasah.

Perencanaan keuangan di MA Hasanudin telah menganut prinsip pembiayaan pendidikan yang efektif, maksudnya adalah alokasi dana yang ada digunakan sesuai dengan visi dan misi madrasah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sesuai visi dan misi dana yang ada sebagian besar dialokasikan untuk program sekolah. Sedangkan penggunaan prinsip efisien maksudnya adalah MA Hasanudin dalam peningkatan mutu pendidikan mampu menekankan biaya, terutama biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa. Buku penerimaan gaji di MA Hasanudin dibuat untuk mencatat gaji para guru dan karyawan yang telah dibayarkan. Gaji para guru dan karyawan ini diberikan setiap satu bulan sekali. Setiap guru dan karyawan menerima gaji sesuai dengan beban kerja yang dibebankan kepada guru dan karyawan tersebut. Guru dan karyawan diharuskan memberikan tanda tangan rangkap dua sebagai bukti bahwa guru atau karyawan tersebut telah menerima gaji pada setiap bulannya (Monita 2019).

Buku pembantu bank di MA Hasanudin dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan penggunaan jasa bank. Pembukuan rekening bank sangat diperlukan karena melalui rekening milik madrasah dana BOS dapat dicairkan. Buku pembantu bank ini dibuat setiap satu bulan sekali sebagai laporan. Format buku pembantu bank yang digunakan adalah tanggal, no. kode, no. bukti, uraian, debit untuk penerimaan, kredit untuk pengeluaran, serta saldo. Laporan keuangan di MA Hasanudin dibuat setiap bulan. Laporan keuangan ini dibuat dengan format nomor, tanggal dan nama transaksi, debit, kredit, dan saldo. Laporan keuangan ini akan dilaporkan setiap bulannya kepada kepala madrasah untuk memudahkan kepala madrasah dalam



mengontrol keuangan madrasah mengenai penerimaan dan pengeluaran madrasah setiap bulannya.

Dokumen lain yang digunakan dalam pencatatan keuangan di MA Hasanudin yaitu faktur. Yang dimaksud faktur dalam pencatatan keuangan di MA Hasanudin disini dapat berupa nota kontan, kuitansi, ataupun bukti pembayaran dan bukti pembelian lainnya yang sah sebagai bukti transaksi. Pembukuan dalam proses pencatatan keuangan yang juga digunakan oleh MA Hasanudin adalah buku tabungan. Buku tabungan disini adalah buku besar yang berisi tentang catatan tabungan siswa atau uang siswa yang disimpan di sekolah. Setiap siswa memiliki nomor akun sendiri dalam buku tabungan yang dibawah oleh bendahara sekolah. Proses pencatatan keuangan pendidikan merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk melaksanakan transparansi keuangan pendidikan. Beberapa catatan keuangan yang digunakan oleh MA Hasanudin dalam proses pencatatan keuangan diantaranya adalah buku kas umum, buku pembantu kas, faktur, buku pembantu bank, buku penerimaan gaji, laporan keuangan dan juga buku tabungan. Pembukuan yang dilakukan oleh MA Hasanudin menggunakan berbagai pembukuan dengan fungsi akuntanssi yang berbeda pada sitiap bukunya, akan tetapi jika dikaitkan dengan pendapat Fattah maka terdapat beberapa pembukuan yang tidak dilakukan oleh MA Hasanudin seperti buku pos, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang serta neraca percobaan. Dan juga terdapat beberapa pembukuan yang dilakuakn oleh MA Hasanudin akan tetapi tidak terdapat pada pendapat Fattah seperti buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku penerimaan gaji, laporan keuangan, dan buku tabungan.

MA Hasanudin tidak menggunakan buku pos karena penggunaan buku pos dirasa kurang efektif, dikarenakan bendahara diharuskan melakukan pencatatan di dua pembukuan yaitu buku pos, dan buku kas umum. Jurnal tidak digunakan dalam pencatatan keuangan karena pencatatan setiap harinya dicatat di buku kas umum. Buku kas pembayaran uang sekolah tidak digunakan karena madrasah tidak membebaskan uang sekolah kepada siswa sehingga buku kas pembayaran tidak dibutuhkan. Neraca percobaan tidak digunakan oleh madrasah karena dalam kontrol keuangan yang dilakukan oleh kepala madrasah setiap bulannya menggunakan laporan keuangan yang disusun oleh bendahara. Buku pembantu kas digunakan dalam pencatatan keuangan di MA Hasanudin untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi sebelum di pindahkan ke buku kas umum, selain itu buku pembantu kas ini lebih difungsikan pada saat dana BOS belum diterima madrasah.

Penggunaan buku penerimaan gaji di MA Hasanudin untuk mencatat besaran gaji yang harus dibayarkan kepada guru dan karyawan setiap bulannya, buku penerimaan gaji disini juga sebagai bukti sah pembayaran gaji guru dan karyawan dikarenakan setiap guru dan karyawan yang telah menerima gaji diharuskan menandatangani buku penerimaan gaji ini. Dana BOS yang diterima oleh MA Hasanudin dicairkan lewat rekening bank maka dari itu penggunaan buku pembantu bank diperlukan untuk mengetahui jumlah uang madrasah yang tersimpan di bank. Laporan keuangan diperlukan untuk memudahkan kepala madrasah melakukan kontrol atas keuangan madrasah setiap bulannya. Penggunaan buku tabungan yang dilakukan oleh MA Hasanudin untuk mengetahui berapa besaran uang siswa yang ditabung di sekolah.



Setiap pembukuan akuntansi dalam pencatatan keuangan memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing. Sehingga dalam proses pencatatan keuangan pembukuan akuntansi yang digunakan seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah, pembukuan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah nantinya akan membuat proses pencatatan keuangan menjadi efektif dan efisien. Melalui pencatatan keuangan ini madrasah mampu melaksanakan dan menjaga akuntabilitas keuangan madrasah, maksudnya adalah uang yang telah dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti orang tua siswa, yayasan, maupun pemerintah. Pengawasan keuangan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen pembiayaan pendidikan di MA Hasanudin yang berfungsi sebagai kontrol atas perencanaan dan pelaksanaan keuangan madrasah. Pengawasan keuangan perlu dilakukan sebagai bentuk wujud transparansi keuangan madrasah, melalui pengawasan keuangan ini pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dan yayasan dapat mengetahui kondisi keuangan di MA Hasanudin. Pengawasan keuangan ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran keuangan dengan cara melakukan pemeriksaan antara pelaksanaan dan perencanaan keuangan. Pengawasan keuangan di MA Hasanudin dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan keuangan secara internal dilakukan oleh kepala sekolah setiap satu bulan sekali, dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara. Sedangkan pengawasan keuangan secara eksternal dilakukan oleh ketua yayasan dan pemerintah. Pengawasan oleh ketua yayasan dilakukan setiap satu tahun sekali, sedangkan pengawasan keuangan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama dilakukan setiap tri wulan sekali.

Pengawasan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang sudah dianggarkan benar-benar dibelanjakan dengan semestinya. Proses pengawasan keuangan di MA Hasanudin dimulai dengan penentuan standar, pelaksanaan pengawasan, pengawas keuangan melakukan identifikasi penyimpangan yang ada, dan yang terakhir yaitu mencari solusi atas penyimpangan yang telah ditemukan. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan membandingkan, antara pelaksanaan dengan apa yang direncanakan, maka dari itu harus ada pembanding dan yang dibandingkan. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan yang dimaksud dengan pembanding adalah standar atau patokan untuk pengawas keuangan melakukan proses pengawasan keuangan. Standar atau Patokan pengawasan yang digunakan oleh pengawas keuangan di MA Hasanudin adalah RAPBM. Setelah para pengawas keuangan menentukan standar maka langkah selanjutnya yaitu pengawas keuangan baik pengawas internal maupun pengawas eksternal melakukan proses pengawasan. Proses pengawasan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan antara pelaksanaan dengan rencana atau membandingkan laporan keuangan dengan RAPBM.

Pelaksanaan pengawasan keuangan secara internal dilakukan oleh kepala madrasah yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan setiap satu semester sekali, dan pengawasan yang dilakukan oleh ketua yayasan dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Melakukan kegiatan pemeriksaan tidak selalu sesuai dengan rencana, ada kemungkinan pada pertengahan tahun terdapat salah satu pembiayaan yang tidak sesuai dengan rencana. Melalui proses pengawasan ini para pengawas keuangan baik pengawas internal



maupun pengawas eksternal dapat menentukan apa saja yang tidak sesuai dengan rencana. Setelah ditemukannya penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan maka pengawas keuangan harus mampu menemukan solusi atau penyelesaian atas masalah tersebut. Kepala madrasah sebagai pengawas keuangan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah yang ada. Pengambilan keputusan terkait dengan keuangan tidak dilakukan oleh kepala madrasah saja akan tetapi kepala madrasah berdiskusi dulu bersama ketua yayasan. Proses pengawasan keuangan di MA Hasanudin pada dasarnya telah sesuai dengan proses pengawasan yang dikemukakan oleh Fattah yaitu proses pengawasan keuangan dimulai dengan penentuan standar. Standar pengawasan keuangan yang ditetapkan oleh pengawas keuangan di MA Hasanudin yaitu RAPBM.

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dapat pula diartikan sebagai kegiatan membandingkan antara yang sebenarnya terjadi dengan standar yang telah ditetapkan, pengawasan keuangan dilakukan oleh pihak internal dan juga pihak eksternal. Pada saat pelaksanaan pengawasan pengawas keuangan melakukan identifikasi apakah ada penyimpangan atau tidak, setelah melakukan identifikasi terhadap adanya penyimpangan, pengawas keuangan harus mampu mencari solusi atau mampu mengambil keputusan terkait penyimpangan yang telah ditemukan tersebut. Setiap lembaga publik terutama lembaga yang menggunakan dana publik seperti sekolah, harus melakukan pertanggungjawaban keuangan, begitu juga dengan MA Hasanudin yang melakukan pertanggungjawaban keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas suatu lembaga. Melalui laporan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bahwa MA Hasanudin telah menggunakan uang madrasah secara bertanggungjawab dan sesuai rencana.

Proses pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh MA Hasanudin dimulai dengan penyusunan laporan keuangan yang ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan kepada Yayasan, langkah selanjutnya setelah disusunnya laporan pertanggungjawaban adalah persetujuan atau pengesahan laporan pertanggungjawaban oleh ketua yayasan. Setiap bulan bendahara menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada kepala madrasah sehingga kepala madrasah dapat mengetahui seberapa besar penerimaan yang didapatkan oleh madrasah dalam satu bulan dan seberapa besar pengeluaran yang dibelanjakan oleh madrasah dalam satu bulan. Setiap tri wulan kepala madrasah dan bendahara madrasah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang ditujukan kepada pemerintah, laporan pertanggungjawaban ini digunakan untuk menyatakan bahwa dana BOS yang diterima madrasah telah dipergunakan sesuai dengan prosedur penggunaannya. Sedangkan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk yayasan disusun setiap satu tahun sekali. Laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak Yayasan Ribhul Ulum disusun setiap akhir tahun ajaran. Pemeriksaan terkait dengan kegiatan, program kerja serta kondisi keuangan di MA Hasanudin yang dilaporkan oleh madrasah apakah telah sesuai dengan yang direncanakan pada awal tahun ajaran atau tidak. Laporan pertanggungjawaban dapat dikatakan sah ketika laporan pertanggungjawaban ditandatangani oleh ketua yayasan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk



akuntabilitas publik dari suatu lembaga terlebih bagi lembaga yang menggunakan sumber dana publik. MA Hasanudin Bandar Lampung melakukan proses pertanggung jawaban keuangan yang dimulai dengan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengesahan laporan pertanggung jawaban.

Laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah berisi laporan pertanggung jawaban atas penerimaan dana, dan penggunaan dana secara keseluruhan selama satu tahun anggaran. Hal ini telah sesuai dengan pertanggung jawaban keuangan, dimana pertanggung jawaban keuangan menyangkut proses pertanggung jawaban penerimaan dana dan penggunaan dana sekolah. Pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan di MA Hasanudin jika dikaitkan dengan tentang proses pertanggung jawaban keuangan maka terdapat perbedaan yaitu pada pengesahan laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban yang telah disusun oleh madrasah dan diserahkan kepada pihak yayasan, nantinya akan disahkan oleh ketua yayasan. Pengesahan laporan pertanggung jawaban keuangan perlu dilakukan karena laporan pertanggung jawaban yang telah disahkan dapat dijadikan bukti kongkrit bahwa madrasah telah melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **KESIMPULAN**

Penganggaran keuangan di MA Hasanudin dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Proses penganggaran keuangan di MA Hasanudin Bandar Lampung dimulai dengan mengadakan rapat pleno, mengidentifikasi sumber penerimaan madrasah, mengidentifikasi pengeluaran madrasah, menyusun RAPBM, mengusulkan RAPBM, melakukan revisi RAPBM, hingga pada tahap pengesahan RAPBM. Pembukuan-pembukuan akuntansi yang digunakan oleh MA Hasanudin Bandar Lampung dalam proses pencatatan keuangan adalah buku kas umum, faktur, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku pembantu bank, laporan keuangan serta buku tabungan. Proses pengawasan keuangan di MA Hasanudin Bandar Lampung dimulai dengan menjadikan RAPBM sebagai standar pengawasan, pelaksanaan pengawasan oleh pihak internal dan pihak eksternal, mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam laporan keuangan, hingga pada tahap penemuan solusi untuk penyimpangan yang telah ditemukan. Pertanggung jawaban keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari suatu lembaga publik, dalam proses pertanggung jawaban keuangan yang dilaksanakan oleh MA Hasanudin yaitu dimulai dengan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan untuk pemerintah dan yayasan, hingga pengesahan laporan pertanggung jawaban tersebut. Sehubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, diharapkan madrasah mampu mempertahankan dan melaksanakan manajemen pembiayaan secara efektif, efisien, serta transparan sehingga, apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan madrasah dapat dicapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Achmad Anwar. 2017. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah



Di Surabaya).” *Jurnal Penjaminan Mutu* 3(1):87–99.

Arifudin, Opan, Nur Rahmi Sonia, I. Putu Ayub Darmawan, Dirvi Surya Abbas, Agung Nugroho Catur Saputro, Hendra Poltak, Cecep Sundulusi, Darmawati Darmawati, Erpin Harahap, and Desi Sijabat. 2021. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan.”

Burhan, Imron, Nurul Afifah, and Sri Nirmala Sari. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Insan Cendekia Mandiri.

Efrina, Lisa, and Andi Warisno. 2021. “Meningkatkan Mutu Melalui Implementasi Manajemen Di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 3(2):214–19.

Fattah, Nanang. 2009. “Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar.” *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan* 28(1).

Gunawan, Imam. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara.

Handoko, Cipto. 2022. “MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN.” *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 8(01).

Hasan, Mustaqim, Andi Warisno, Nasruddin Harahap, and Nurul Hidayati Murtafiah. 2022. “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro.” *An Naba* 5(2):34–54.

Mesiono, Mesiono, Suswanto Suswanto, Rahmat Rifai Lubis, and Haidir Haidir. 2021. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai.” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 13(1):119–34.

Monita, Dinda Fitri. 2019. “Pembiayaan Dalam Pendidikan.”

Murtafiah, Nurul Hidayati. 2022. “ANALISIS MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL (STUDI KASUS: IAI AN NUR LAMPUNG).” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10(02).

Nugrahani, Farida, and M. Hum. 2014. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Solo: Cakra Books* 1(1):3–4.

Rahmadoni, Jefril. 2018. “Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SD Indonesian Creative School Pekanbaru.” *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 3(2):161–69.



- Rustiawan, Hafid. 2015. "KOMERSIALISASI PENDIDIKAN: Analisis Pembiayaan Pendidikan." *Tazkiya* 16(01):44–63.
- Sonedi, Sonedi, Zulfa Jamalie, and Majeri Majeri. 2017. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat." *Fenomena* 25–46.
- Sudarmono, Sudarmono, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar Us. 2021. "Pembiayaan Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2(1):266–80.
- Waliyah, Siti, Siti Hadiyanti Dini, and Ahmad Syarif. 2021. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 Di SMK Gazza Wiguna 1." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 1(1):77–98.
- Warisno, Andi, and Nur Hidayah. 2021. "FUNGSI MANAJERIAL KEPALA MADRASAH DALAM MENCIPTAKAN MADRASAH EFEKTIF DI MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUL MUBTADIIN KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN." *Jurnal Mubtadiin* 7(02):29–45.
- Yasin, Muhammad, and Ratika Novianti. 2021. "Implementasi Media Whatsapp Dalam Pembelajaran Era Pandemi Covid-19." *An Nida*.